

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dimana ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup disuatu daerah. Rendahnya pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta rendahnya kuliatas sumber daya manusia yang dimiliki yang menjadi penyebab kemiskinan itu terjadi. Rendahnya pendapatan juga berakibat pada kemampuan memenuhi standar hidup seperti standar pendidikan dan standar kesehatan berkurang. Negara berkembang merupakan negara yang sering memiliki masalah kemiskinan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat tidak merata dan memicu ketimpangan sosial.

Ketidakmerataan kesejahteraan ini merupakan bagian dari fenomena kemiskinan yang terjadi diberbagai negara. Banyak definisi tentang kemiskinan. BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Sedangkan Badan

Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar (Bappenas, 2010).

Menurut Chambers (1987) mendefinisikan tentang kemiskinan adalah dalah suatu konsep yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1. Kemiskinan

Adalah kemiskinan yang memiliki pengertian dimana kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok, konsep yang bukan hanya berlaku bagi sekelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi juga dapat berlaku pada kelompok yang sudah memiliki pendapatan.

2. Ketidakberdayaan

Pada umumnya, rendahnya suatu pendapatan yang diterima akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) yang terdapat pada diri seseorang atau kelompok orang dalam memperoleh keadilan ataupun dalam persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

3. Kerentanan

Seseorang dikatakan miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang mendesak dan tidak terduga dimana pada situasi tersebut membutuhkan alokasi dari pendapatan untuk mengatasinya. Salah satu situasi rentan yaitu bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang relatif mahal dan situasi yang lainnya. Situasi kerentanan tersebut yang diyakini bahwa orang yang dikatakan miskin tidak akan mampu menghadapinya.

4. Ketergantungan

Keterbatasan dari kemampuan pendapatan ataupun kekuatan dari aspek sosial dari seseorang yang dikatakan miskin tadi menyebabkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa pihak. Sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan dalam menciptakan solusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan terciptanya pendapatan baru. Bantuan dari pihak lain diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut terutama masalah yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5. Keterasingan

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah yang menjadi penyebab seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin adalah disebabkan faktor lokasi. Dimana pada umumnya, masyarakat miskin berada didaerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak

yang terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi seperti perkotaan atau kota-kota besar. Sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesejahteraan yang ada memiliki tarif hidup yang rendah sehingga kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

b) Aspek Kemiskinan

Terdapat tiga aspek menurut Andre Bayo Ala (1981) dalam Yuliadi (2007) yaitu:

1. Bahwa kemiskinan bersifat multidimensional karena menyangkut karakter manusia yang memerlukan berbagai jenis kebutuhan dan terkait dengan berbagai dimensi kehidupan. Didalam kemiskinan terdapat beberapa aspek. Pertama aspek primer, yaitu miskin asset, organisasi sosial politik, pendidikan dan keterampilan. Kedua aspek sekunder, yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga menyangkut berbagai dimensi diantaranya berupa kekurangan protein dan kalori (mal nutrisi), sarana perumahan yang tidak sehat, pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas dan fasilitas kesehatan yang terbatas.

2. Aspek-aspek kemiskinan yang saling berkaitan dapat diartikan bahwa persoalan kemiskinan menyangkut dimensi kehidupan individu, sosial, ekonomi dan non ekonomi yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kemiskinan menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti bahwa persoalan kemiskinan tergantung bagaimana manusia mensikapinya. Jadi kebijakan pengentasan kemiskinan harus berorientasi pada upaya merubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan.

c) Penyebab Kemiskinan

Penyebab dasar kemiskinan menurut Bank Dunia (2003) adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam kepemilikan terutama tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4. Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional vs ekonomi modern).
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (Prihatini, 2006 dalam Khomsan, dkk. 2015).

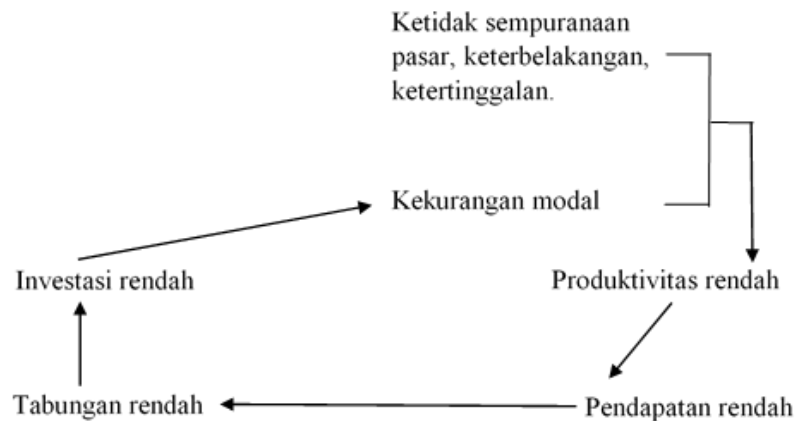
Penyebab kemiskinan menurut Sharp. et,al (1996:h. 173-191) dalam Kuncoro (1997) adalah sebagai berikut:

1) Dari segi mikro kemiskinan disebabkan dari ketidakseimbangan pola sumber daya yang dimiliki sehingga terjadi ketimpangan pada distribusi pendapatan. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.

2) Kemiskinan muncul dikarenakan adanya perbedaan pada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berefek kepada rendahnya produktivitas yang mengakibatkan rendahnya upah yang dimiliki. Rendahnya sumber daya manusia diakibatkan dari rendahnya pendidikan yang diterima, nasib yang kurang menguntungkan, terdapat diskriminasi atau karena faktor keturunan.

3) Adanya kemiskinan disebabkan oleh adanya perbedaan akses dalam modal.

Dari ketiga faktor penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidakseimbangan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



Sumber: R. Nurkse (1953) dalam Kuncoro (1997)

Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Sedangkan menurut Paul Spicker (2002) dalam Dama, dkk (2016) kemiskinan disebabkan oleh empat faktor yaitu:

1. *Individual Explanantion*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.

2. *Familial Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan. Dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang terutama akibat pendidikan.

3. *Subcultural Explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.

4. *Structural Explanation*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

d) Bentuk-bentuk kemiskinan

Chamber dalam Nasikun (2001) lihat Khomsan, dkk (2015).

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan absolut. Adalah ketika pendapatan seseorang berada dibawah garis kemiskinan atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk sandang pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif. Suatu kondisi kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat.
3. Kemiskinan kultular, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan structural, yaitu situasi kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Sedangkan menurut Lincoln (2010) kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kemiskinan absolut. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum.

b. Kemiskinan relatif. Kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

e) Indikator kemiskinan

Menurut Lincolin (1997. hal: 221) terdapat tiga indikator kemiskinan yaitu:

1. Tingkat konsumsi beras

Sajogyo (1997) menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.

Label 2. 1
Tingkat Konsumsi Beras Per Kapita

	Pedesaan	Perkotaan
a. Malarat	180 kg	270 kg
b. Sangat miskin	240 kg	360 kg
c. Miskin	320 kg	480 kg

Sumber : Lincolin (1997)

2. Tingkat pendapatan

Pendapatan yang diterima baik di kota maupun di perkotaan beragam dikarenakan faktor kebutuhan di perkotaan yang lebih tinggi membuat batas garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan batas garis kemiskinan di pedesaan.

Label 2. 2
Garis Kemiskinan Menurut Daerah Maret 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2018	295272	120342	415614
Perdesaan			
Maret 2018	294302	89606	383908

Sumber: BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018

Garis kemiskinan dari tabel diatas menunjukkan garis kemiskinan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan lebih tinggi garis kemiskinan di perkotaan.

3. Indikator kesejahteraan rakyat

Dalam publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement Of Living: An Interim Guide* disarankan 0 komponen kesejahteraan. Yaitu kesehatan, konsumsi makan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial sandang, rekreasi dan kebebasan.

f) Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan mempunyai arti beragam sebagaimana menurut Beik dan Arsyianti (2016) mengatakan bahwa kemiskinan adalah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal.

Sedangkan menurut Shirazi (1994) dan Pramanik (1993, 1998) dalam Beik dan Arsyianti (2016) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memnuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial psikologi maupun dimensi spiritual.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Suharto (2009) dalam Beik dan Arsyianti (2016) mengemukakan bahwa terdapat empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual. Dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. Kedua, faktor sosial. Dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural. Dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural. Dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi.

Sedangkan definisi kemiskinan menurut Nabi Muhammad dikemukakan dalam suatu hadist yaitu:

قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَنَزِدُّهُمُ اللَّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ
 قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ
 النَّاسَ شَيْئًا

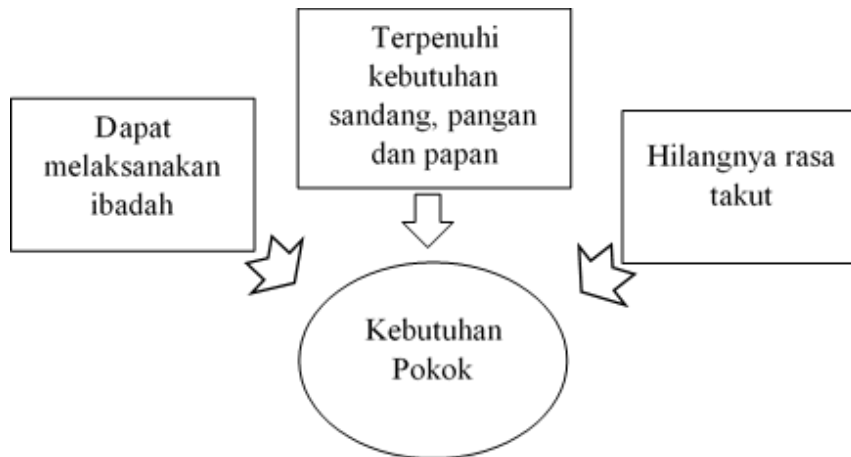
Artinya: “Orang miskin bukanlah mereka yg berkeliling memintaminta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makanan dan satu-dua butir kurma. “Para sahabat bertanya. “Ya Rasulullah. (kalau begitu) siapa yang dimaksud orang miskin itu? Beliau menjawab. “Mereka ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan tidak ada yang menyadari (kemiskinannya) sehingga tidak ada yang memberinya sedekah (zakat) dan mereka tidak mau minta-minta sesuatu pun kepada orang lain.”

Kemiskinan yang pada umumnya didasarkan kepada ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagaimana sesuai hadist yang diatas. Kebutuhan yang diyakini hanya sebatas kebutuhan terhadap materi semata, dalam ekonomi islam atau dalam orang islam menjalani kehidupan kebutuhan seseorang bukan hanya sebatas kebutuhan materi, melainkan terdapat kebutuhan lain seperti kebutuhan spiritual dan beribadah.

Beik dan Arsyianti (2016) mengemukakan tentang bagaimana kebutuhan dalam islam sebagaimana yang tertuang dalam dalam QS. 20: 118-119 dan QS. Al-Quraisy: 3-. dijelaskan bahwa kebutuhan pokok itu antara lain adalah:

1. Dapat melaksanakan ibadah.

2. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
3. Hilangnya rasa takut.



Sumber: Beik dan Arsyianti (2016)

Gambar 2. 2 **Tiga Kebutuhan Pokok Menurut Syariah**

Dengan demikian harus adanya standarisasi kebutuhan yang dimana bukan hanya yang bersifat duniawi yaitu seperti kebutuhan akan materi melainkan standarisasi kebutuhan ukhroqi seperti kebutuhan akan spiritual dan beribadah seharusnya dipenuhi sehingga definisi kemiskinan bukan hanya materi tetapi juga bisa dikembangkan menjadi kemiskinan spiritual.

Seorang muslim yang kehidupannya bergemilang harta dituntut dalam islam agar bisa mengoptimalkan hartanya dijalan yang benar seperti halnya memberikan sebagian hartanya untuk saudara-saudara yang masih belum berkucupan. Ketentuan itu bukan tanpa alasan karena sebagaimana Allah SWT berfirman tentang bagaimana seorang muslim dalam mengelola hartanya dalam Al-quran surah Al Hasyr (59): 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

a. Zakat

Zakat adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (9: 103)

Dalam QS. At Taubah (Pengampunan) – surah 9 ayat 60 [QS. 9:60]

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Ahmad (2015) zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:

a) Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana untuk beribadah diri kepada Allah. Serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makin kuat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, maka ia akan dekat dengan dirinya.

b) Hubungan manusia dengan dirinya

Adakalanya pandangan manusia tentang harta benda beregam, ada yang menganggapnya sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup dan adakalanya manusia menganggap harta benda itu hanya titipan yang harus pada suatu waktu tertentu harta benda tersebut diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena tujuan utama manusia dalam kehidupan disetiap harinya hanyalah beribadah kepada Allah agar mendapatkan kehidupan yang diridhoi, oleh karenanya Allah menjadi tujuan hidup. Pandangan manusia menjadikan harta sebagai perantara dalam berkehidupan harus melaksanakan tugasnya yaitu mengeluarkan zakat. Zakat menjadi salah satu cara untuk memberantas pandangan hidup yang materialistis karena disisi

lain zakat memiliki peran menjaga manusia dari rusaknya jiwa. Zakat juga dapat memberikan kesucian diri bagi setiap orang yang ikhlas melakukannya, artinya suci dari sifat kikir, rakus, tamak dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Zakat berfungsi mensucikan jiwa pemiliknya Robinson (2001:181) dalam Ahmad (2015).

c) Hubungan manusia dengan masyarakat

Dalam berkehidupan bermasyarakat selalu ada perbedaan tingkat kemampuan seseorang dalam bidang ekonomi sehingga lahirlah yang disebut ekonomi lemah dan ekonomi kuat. Zakat juga dapat menjadi pemisah antara golongan si kaya dan si miskin. Karena sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh golongan kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi pada golongan miskin. Sehingga zakat bisa mencegah perbuatan yang hina seperti pencurian dan menghindarkan mereka dari rasa iri dan dengki terhadap golongan yang kaya.

d) Hubungan manusia dengan harta benda

Zakat yang apabila dilaksanakan dalam suatu masyarakat maka akan memberikan beberapa dampak karena harta kekayaan yang dimiliki memiliki fungsi sosial. Sehingga zakat akan memberikan dampak dalam terwujudnya keseimbangan dalam pendistribusian harta (*Equal Distribution*), keseimbangan dan pemilikan harta (*Equal Ownership*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

e) Zakat adalah *maliyah*

Zakat yang memiliki fungsi sosial ekonomi dalam hal pemeretaan pendapatan merupakan perwujudan dari solidaritas sosial. Zakat dalam islam merupakan sumber utama kas negara sekaligus merupakan sendi-sendi dari perekonomian yang disyariatkan dalam Al-Quran. Zakat ketika bisa dimaksimalkan dengan baik maka akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas. Sekaligus dalam penguasaan asset-aset oleh umat islam.

b. Infaq

Infaq adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain (Uyun, 2015).

Infaq menjadi salah satu cara pendistribusian harta sebagaimana tercantum dalam QS. Al Baqarah (Sapi Betina) – surah 2 ayat 215 [QS. 2:215]

يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

c. Shadaqah

Menurut Mu'is (2011) dalam Habib (2016) sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Dalam Alquran anjuran tentang bersedekah terdapat dalam beberapa surah seperti dalam Surat At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq: 7).

Bersedekah bukan hanya tentang seberapa besar ketika kita memberi akan tetapi sebagaimana niat kita dalam melakukan hal tersebut.

Anjuran tentang bagaimana seroang muslim dalam mengelola hartanya agar menyisihkan sebagian hartanya bisa dengan melakukan tiga cara seperti zakat, infaq dan shodaqah. Ketiga cara penyaluran dalam mengoptimalkan tersebut bisa dijadikan instrument dalam islam untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2. 3
Perhimpunan ZIS Lembaga di Indonesia

Tahun	Perorangan	Lembaga	Total
2012	22.186.801.085	30.267.494.341	52.454.295.426
2013	24.955.456.166	23.217.279.557	48.172.735.723
2014	140.585.373.579	45.298.843.305	185.884.216.884
2015	269.884.547.435	74.089.629.661	343.974.177.096
2016	366.505.392.158	92.666.861.124	459.172.253.282

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2017

Potensi zakat infaq dan sedekah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari masing-masing lembaga penghimpun zakat baik dari perorangan maupun lembaga ini membuktikan bahwasannya kesadaran tentang arti penting zakat sudah mulai tertanam banyak pada masyarakat. Dikarenakan fungsi dari zakat dari sisi untuk menyucikan diri, zakat juga memberikan efek terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi. Terdapat empat peran yang dapat dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu:

(1) Memoderasi kesenjangan sosial, peran zakat disini adalah mendistribusikan kekayaan dari setiap orang yang berkewajiban dalam menunaikan zakat (muzakki) kepada orang yang membutuhkan (muztahik) sehingga dengan pendistribusian efek tersebut memberikan efek dalam mengurangi kesenjangan sosial yang ada diantara golongan kaya dan golongan miskin dan dengan pendistribusian zakat dapat diyakini bisa mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi.

(2) Membangkitkan ekonomi kerakyatan, zakat yang disalurkan kepada mustahik bisa mendorong daya beli mereka dan juga zakat bisa mengambil peran dalam menmbangkitkan ekonomi kerakyatan, dimana

dengan penyaluran dana zakat baik yang bersifat karitatif maupun yang bersifat produktif zakat bisa mampu memberdayakan ekonomi masyarakat miskin.

(3) Mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, selama ini pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat tergantung kepada keberpihakan dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang dalam pengaplikasiannya menjadi syarat wajib yang terdapat dalam kehidupan umat islam. Sehingga menjadikan zakat sebagai terobosan dalam mengentaskan kemiskinan. dan

(4) Mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana Rp 286 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam delapan *ashnaf* (kategori) *mustahik*. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Islam juga telah mengatur pendistribusian kekayaan (Yuliadi, 2007) :

1) Wajibnya muzakki (orang yang berzakat) membayar zakatnya dan diberikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) khususnya kalangan fakir miskin.

2) Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum, negara berhak mengelola secara optimal dan efisien serta mendistribusikannya kepada masyarakat secara adil dan proporsional.

3) Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya.

4) Pemberian harta waris kepada ahli warisnya.

5) Larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakat.

4. Indeks Pembangunan Manusia

a) Konsep Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Sehingga menjadikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2018).

Pembangunan manusia mempunyai cakupan yang luas dimana yang mendasari pembangunan manusia adalah terciptanya pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan lingkungan serta terdapat perubahan dalam kesejahteraan manusia.

IPM dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik. Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{x(1)x(2)x(3)} \quad (2.1)$$

Dimana : X(1) : Indeks Harapan Hidup.

X(2) : Indeks Pendidikan = $\frac{1}{2}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah) + $\frac{1}{2}$ (Indeks Rata-Rata Lama Sekolah).

X(3) : Indeks Paritas Dayabeli.

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisar antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik).

b) Komponen-komponen IPM

Indeks Pembangunan Manusia memiliki tiga komponen pembentuk yaitu:

a. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah indeks yang memuat rata-rata perkiraan berapa tahun seseorang dalam menempuh hidup mereka. Pendekatan dalam menghitung angka harapan hidup adalah menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Indeks ini dihitung dengan menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan UNDP, yaitu angka 85 tahun sebagai angka tertinggi dan 20 tahun sebagai angka terendah dalam perhitungan tersebut.

Perhitungan komponen AHH dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{max}} - UHH_{\text{min}}} \quad (2.2)$$

b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan memiliki dua indikator perhitungan. Yaitu indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah diberikan bobot yang sama kemudian kedua indikator tersebut digabung sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah adalah perhitungan dengan menggunakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia diatas 25 tahun dalam menjalani pendidikan. Standar menurut UNDP adalah menggunakan 15 tahun sebagai batas maksimum dan batas minimum menggunakan 0 tahun. Dimana dapat dihitung dengan menggunakan:

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{max}} - \text{RLS}_{\text{min}}} \quad (2.3)$$

Sedangkan harapan lama sekolah dapat dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun keatas. Dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjuk dalam periode lama pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan ditempuh oleh setiap anak. Dalam perhitungan ini adalah menggunakan batas maksimum 18 tahun dan 0 tahun untuk batas minimum. Dimana dapat hitung dengan menggunakan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (2.4)$$

c. Indeks Pengeluaran/Indakator Daya Beli

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang layak. Dalam cakupan yang lebih luas standar hidup yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk nasional bruto (PNB) perkapita yang disesuaikan. Sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli berbasis formula *rao*.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m} \quad (2.5)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : harga komoditas I di Jakarta Selatan

M : jumlah komoditas

Perhitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan pada 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum dan minimum perhitungan pengeluaran per kapita adalah Rp 26.572.352. dan Rp 1.007.436 sebagai batas minimum. Dimana formula untuk menghitung indeks pengeluaran yaitu:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{Pengeluaran}_{\min})} \quad (2.6)$$

c) Status pembangunan manusia

Capain dalam pembangunan manusia pada suatu wilayah dengan waktu tertentu dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok. Tujuan dalam pengelompokkan ini adalah untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

d) Pertumbuhan IPM

Dalam mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan disetiap tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka peningkatan IPM semakin cepat. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah pada suatu kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (2.7)$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1) (BPS 2017)

e) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan

Todaro (2004) dalam Amali (2017) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan dari suatu negara dalam menyerap teknologi modern sehingga bisa mengembangkan kapasitas yang dimiliki yang nantinya akan berdampak pada terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan yang tercipta berkat dari efektifitas teknologi yang dimiliki di imbangi dengan pembangunan manusia yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan meningkatnya transaksi-transaksi yang ada begitupun seseorang bisa meningkatkan produktifitas dan mendapatkan upah dari pekerjaan yang dimiliki, sehingga kebutuhan mereka bisa tercapai.

5. Produk Domestik Regional Bruto

a. Pengertian PDRB

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2018).

PDRB menggunakan dua dasar harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan atas PDRB atas dasar harga konstan

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tertentu sebagai dasar.

b. Kegunaan data PDRB

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.

3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

c. Cara penyajian dan angka indeks

PDRB yang telah diuraikan sebelumnya disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar yang dapat dijelaskan berikut ini:

a) Penyajian atas dasar harga berlaku semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b) Penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi bukan karena faktor fluktuasi harga (inflasi/deflasi).

d. Komponen PDRB

Penjelasan juga mencakup perhitungan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. Penggunaan PDRB dibedakan menjadi enam kategori, yaitu: pengeluaran konsumsi rumahtangga (C_1); pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung (C_2); pengeluaran konsumsi pemerintah (G); pembentuk modal tetap domestik bruto (I_1); perubahan stok (I_2); serta ekspor dan impor barang dan jasa ($X-M$), umumnya penjumlahan C_1 dan C_2 ditulis $C = C_1 + C_2$ dan penjumlahan dari I_1 dan I_2 ditulis $I = I_1 + I_2$. Sehingga PDRB menurut penggunaan dirumuskan:

$$\text{PDRB} = C + G + I + (X - M) \quad (2.8)$$

a) Pengeluaran Konsumsi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Untuk

memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumahtangga, digunakan data pokok hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas). Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga didasarkan kepada data pokok hasil Susenas, data penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK).

b) Pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung

Perkiraan besarnya pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung didasarkan kepada perkalian antara jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua yang dilayani (dalam panti wredha), jumlah murid, dan indikator dari kegiatan sosial lainnya dengan rata-rata konsumsi selama satu tahun. Proses perhitungan ini menghasilkan nilai konsumsi atas dasar harga berlaku. Sedangkan perkiraan nilai konsumsi atas dasar harga konstan adalah dengan cara deflasi (IHK kelompok aneka barang dan jasa sebagai deflator). Cara ini dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator produksi masing-masing tahun berjalan dengan nilai konsumsi pada tahun dasar. Bagian lembaga swasta yang tidak mencari untung meliputi lembaga-lembaga panti asuhan, panti wredha, sekolah dan kegiatan sosial lainnya.

c) Pengeluaran konsumsi pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, sebagian belanja barang yang bersifat rutin (biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dan penyusutan. Kegiatan konsumsi ini mencakup yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kegiatan penjualan hasil-hasil riset dan

percobaan dan semacamnya dianggap sebagai pengurang besarnya total konsumsi.

d) Pembentukan modal tetap domestik bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dalam negeri (region) dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri. Barang modal yang dibeli atau dibuat sendiri adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat dibedakan atas:

- a. Pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi
- b. Pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan.

e) Perubahan stok

Pengertian perubahan stok dalam konteks PDRB adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun, baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai *input* pada suatu kegiatan produksi atau barang-barang untuk di jual kembali, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual (barang jadi maupun setengah jadi).

f) Ekspor dan impor barang dan jasa

Ekspor dan impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk baik penduduk dalam negeri maupun luar negeri. Ekspor dan impor jasa meliputi jasa.

e. Permasalahan perhitungan PDRB

1) Beberapa output tidak terukur dengan baik karena mereka tidak diperdagangkan dipasar.

2) Beberapa aktifitas yang diukur sebagai penambahan terhadap PDB pada faktanya mencerminkan penggunaan sumber daya untuk mencegah atau terjangkiti “keburukan” seperti kriminalitas atau ancaman terhadap keamanan nasional. Sama halnya perhitungan PDB juga tidak mengurangi apapun untuk polusi dan kerusakan lingkungan.

3) Sulit untuk menghitung secara benar perkembangan dalam kualitas barang. Hal ini terjadi terutama pada kasus computer, dimana kualitas barang telah mengalami perbaikan secara dramatis sementara harganya jatuh secara tajam.

f. Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

Kuznet (2001) dalam Permana dan Arianti (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

6. Pengangguran

Menurut Sukirno (2004), pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

A. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut (Basuki & Prawoto, 2015) membagi pengangguran kedalam beberapa jenis antara lain:

A) Pengangguran menurut sebab terjadinya yaitu:

1. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur terjadi disebabkan adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya jika kegiatan ekonomi menurun maka pengangguran tinggi.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut misalnya dalam suatu pergesaran dari ekonomi yang condong agraris menjadi ekonomi yang condong industri. Disatu pihak akan terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan dipihak lain bertambah kebutuhan disektor industri.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang terjadi disebabkan karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan

selama prosedur pelamaran dan seleksi atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi.

B) Pengangguran yang di latarbelakangi oleh keadaan yang berkaitan dengan kelebihan tenaga kerja, kondisi alam, lama jam kerja, jumlah pendapatan, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Model-model dari pengangguran tersebut yaitu:

1. Pengangguran musiman

Pengangguran yang disebabkan oleh pergantian musim. Pengangguran ini biasanya terjadi pada sektor pertanian, dimana ketika musim hujan tiba petani dapat bekerja di persawahan akan tetapi ketika musim kemarau tiba para petani menganggur dikarenakan mereka harus menunggu musim hujan datang kembali.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang diakibatkan terjadinya pesimesme dalam diri seseorang yang disebabkan terjadinya siklus permintaan tenaga kerja yang sering naik turun. Pengangguran ini hampir sama dengan pengangguran musiman akan tetapi pengangguran siklikal terjadi dalam jangka panjang.

3. Pengangguran setengah menganggur

Pengangguran yang sering terjadi dinegara berkembang yaitu mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan adanya ketidakpastian dalam kesehariannya disebabkan rendahnya pendidikan penduduk sehingga tidak cocok dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pengangguran setengah menganggur dibagi menjadi dua kelompok yaitu: Pertama, setengah pengangguran terpaksa. Yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Kedua, setengah menganggur sukarela. Yaitu mereka yang bekerja dibawah jam normal tetapi dalam keadaan tidak sedang mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

Rumus perhitungan setengah menganggur:

$$= \frac{\sum \text{pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\% \quad (2.9)$$

4. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang diakibatkan surplus supply tenaga kerja sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran yang tidak kentara. Tenaga kerja yang semestinya dapat dialihkan dari satu sektor ke sektor yang lain tidak akan mempengaruhi produksi yang berakibat pada upah jauh dibawah standar normal.

5. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum juga memulai pekerjaan tersebut.

Sedangkan menurut Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh seseorang yang meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang menurut mereka lebih baik dan sesuai dengan keinginan mereka.

2) Pengangguran structural, yaitu pengangguran yang terjadi disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

3) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan dari berlebihnya pengangguran alamiah diakibatkan adanya pengurangan dalam permintaan agregat.

Edwards (1974) dalam Lincolin (1997), membagi pengangguran kedalam berbagai bentuk, diantaranya:

a) Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.

b) Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

c) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.

d) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

B. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

Hubungan pengangguran terhadap kemiskinan adalah ketika tingkat pengangguran semakin ditekan maka tingkat kemiskinan juga akan berkurang, karena penduduk akan mendapatkan upah dari hasil kerja mereka sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan semakin banyaknya penduduk yang bekerja sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak dengan upah yang diterima tentunya kemiskinan bisa berkurang.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara antara lain. Pertama, jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*. Kedua, jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Menurut Sukirno (2008:331), pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk pada pemerataan distribusi pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan dapat memperoleh pendapatan. Maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Ditinjau dari segi mikro, apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan

maka akan timbul berbagai masalah. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pembelanjaan. Kedua, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan. Masalah tersebut sangatlah erat hubungannya dengan masalah kemiskinan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ridho Andhykha. Herniwati Retno Handayani Dan Nenek Woyanti (2018)	Analisis Pengaruh PDRB. Tingkat Pengangguran dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	PDRB. Tingkat pengangguran dan IPM	PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. dan IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2	Gamal Abdul Aziz. Eny Rochaida. Wassilan. (2016)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penduduk miskin. laju pertumbuhan pendidikan (angka melek huruf). jumlah pengangguran dan pengeluaran pemerintah.	Laju pertumbuhan. pengeluaran pemerintah berpengaruh dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif.
3	Dick Wahyudi. Tri Wahyu Rejekingsih (2013)	Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah	Pendidikan. kesehatan. pengeluaran pemerintah. pertumbuhan ekonomi	Kesehatan. pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif.

			dan pengangguran	pengangguran berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi
4	Ridzky Giovanni (2018)	Analisis Pengaruh PDRB. Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa Timur Tahun 2009-2016	PDRB. Pengangguran dan pendidikan	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan. pengangguran dan pendidikan tidak signifikan berpengaruh.
5	Renta Yustie (2017)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat Pengangguran Terbuka. dan Kemiskinan.	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negatif. dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan.
6	Aria Bhaswara Mohammad Bintang. Nenek Woyanti (2018)	Pengaruh PDRB. pendidikan. kesehatan. dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015)	PDRB. Pendidikan. Kesehatan dan Pengangguran.	PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. pendidikan berpengaruh negatifi. kesehatan berpengaruh negatif. dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.
7	Noor Zuhdiyati dan David Kaluge (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di	Pertumbuhan ekonomi. TPT dan IPM	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. IPM

		Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)		berpengaruh terhadap kemiskinan. dan TPT tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
8	Setyo Novianto dan Heri Sudarsono (2018)	Analysis Of Poverty Level In Districts/Cities Of Central Java	Tingkat kemiskinan. IPM. inflasi. dan pengangguran	Pertumbuhan ekonomi. IPM. dan Inflasi berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. Sementara pengangguran positif mempengaruhi tingkat kemiskinan.
9	Nurisqi Amalia. Anisa Nurpita. dan Rina Oktavia. (2018)	Human Development Index. Unemployment and poverty in papua province. 2010-2015	Human Development Index. Unemployment and poverty.	Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memiliki efek negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di kabupaten / kota di Provinsi Papua. Tingkat pengangguran (TP) memiliki positif dan dampak signifikan pada tingkat kemiskinan.
10	Anna Marinda. Nasikh. Imam Mukhlis. Mit Witjaksono. Sugeng Hadi Utomo. Handoko. Hari Wahyono. Hadi Yohanes Hadi Soesilo8. Moetheriono dan Setyobudi Santoso	The Analysis of the Economic Growth. Minimum Wage. And Unemployment Rate to the Poverty level in East Java	Economic Growth. Minimum Wage. Unemployment Rate. and Poverty	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berdampak negatif pada tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dan tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan Jawa Timur secara

	(2018)			positif. Artinya saat pengangguran Tingkat semakin tinggi. jumlah keluarga miskin juga meningkat.
11	Vinny Alvionita Riva Hainim Kadir Deny Setiawan (2014)	Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau	Tingkat Pengangguran terbuka. Tingkat Upah Minimum dan kemiskinan	Tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. sedangkan tingkat upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
12	Fima Anggadini (2015)	Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup. Angka Melek Huruf. Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013	Angka harapan hidup. Angka Melek Huruf. Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita dan kemiskinan.	Angka harapan hidup dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Angka melek huruf tidak berpengaruh. Dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
13	Shinta Setya Ningrum (2017)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka.	Indeks Pembangunan Manusia. Jumlah Penduduk	Upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif

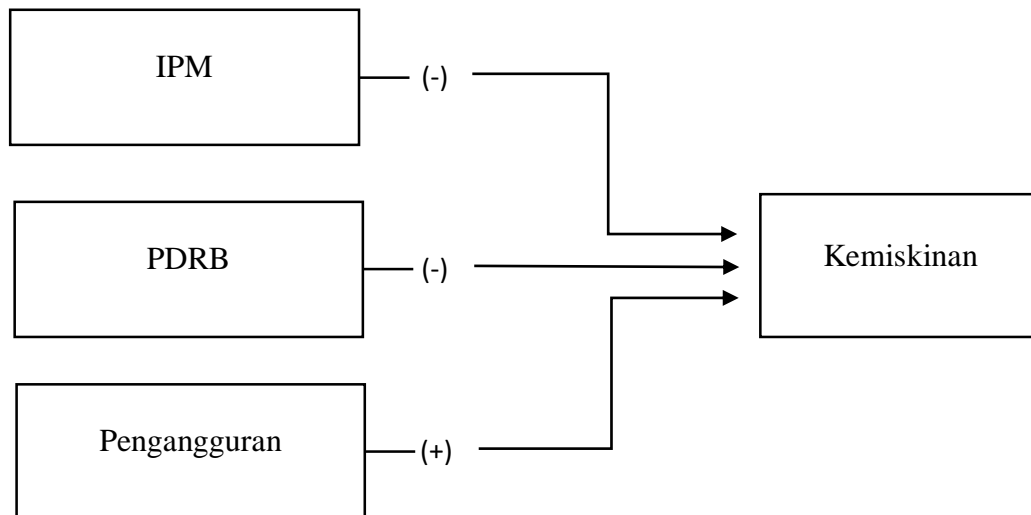
		Indeks Pembangunan Manusia. dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015	Miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka. Upah Minimum	dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
14	Waseso Segoro. Muhamad Akbar Pou (2016)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb). Inflasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012	PDRB. Inflasi. IPM. Pengangguran. Kemiskinan	PDRB dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.
15	M. Alhudori (2017)	Pengaruh IPM. PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi	IPM. PDRB. Pengangguran. Penduduk Miskin	IPM dan PDRB berpengaruh negatif. dan pengangguran berpengaruh positif terhadap penduduk miskin.
16	Nurul Fadlillah. Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita. Tingkat Pengangguran. IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah	Pendapatan Per Kapita. Tingkat Pengangguran. IPM. Pertumbuhan Penduduk dan Kemiskinan	Pendapatan per kapita dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan. dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan

		Tahun 2009-2013		penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
17	I Made Parwata. I Wayan Swendra. Fridayana Yudiaatmaja. (2016)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan	Produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan	PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif.
18	Muhammad Amali (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Langsung Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi	Pertumbuhan ekonomi. indeks pembangunan manusia. belanja langsung dan kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan belanja langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
19	Sindi Paramita sari dan Darussamin. (2016)	Analisis Pdrb. Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2013	PDRB. tingkat pendidikan. tingkat pengangguran. dan tingkat kemiskinan.	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan. tingkat pendidikan berpengaruh negatif. dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
20	Asih Handayani (2018)	Pengaruh Tingkat Pendidikan. Kesehatan Dan	Tingkat pendidikan. kesehatan. penganggur	Tingkat pendidikan berpengaruh negatif. kesehatan berpengaruh

		Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 - 2015	an. dan tingkat kemiskinan.	negatif. dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
--	--	--	-----------------------------	--

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



D. Hipotesis

1. Diduga ada hubungan negatif dan signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan di Pulau Madura.
2. Diduga ada hubungan negatif dan signifikan antara PDRB dengan kemiskinan di Pulau Madura.
3. Diduga ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan di Pulau Madura.